

Determinan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Prithayu Karatri^{1*}, and Rosyadi²

^{1,2} Universitas Tanjungpura, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 26 August 26

Final Revision: 09 September 26

Accepted: 17 September 26

Online Publication: 00 September 26

KEYWORDS

Fiscal Independence, Economic Growth, Regional Expenditure, Population, Domestic Investment

KATA KUNCI

Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Dalam Negeri

CORRESPONDING AUTHOR

prithayuk@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v8i4.567

A B S T R A C T

This study aims to analyze the determinants of fiscal independence of regencies/cities in West Kalimantan Province by examining the effects of Gross Regional Domestic Product (GRDP), regional expenditure, and population on fiscal independence. This study employs a quantitative approach with an explanatory design and utilizes secondary data from 14 regencies/cities in West Kalimantan Province during the 2015–2024 period, resulting in 140 observations. The dependent variable in this study is fiscal independence, measured based on the ratio of Regional Original Revenue (PAD) to total regional revenue, while the independent variables include GRDP, regional expenditure, and population. The analytical method used is panel data regression with the assistance of EViews software. The results show that GRDP has a positive and significant effect on fiscal independence. Regional expenditure has a negative but insignificant effect on fiscal independence, while population has a positive but insignificant effect on fiscal independence. Simultaneously, GRDP, regional expenditure, and population have a significant effect on fiscal independence. The findings imply that efforts to increase fiscal independence should be more strongly directed toward strengthening regional economic activities that are capable of expanding the Regional Original Revenue base, accompanied by improvements in the quality and productivity of regional expenditure. Population growth needs to be accompanied by increased economic productivity and an expanded revenue base so that demographic potential can contribute to regional fiscal capacity. Policies aimed at increasing fiscal independence should also take into account the characteristics and capacities of each regency/city in West Kalimantan Province.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja daerah, dan jumlah penduduk terhadap kemandirian fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori dan memanfaatkan data sekunder dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024, sehingga diperoleh 140 observasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian fiskal yang diukur berdasarkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, sedangkan variabel independennya meliputi PDRB, belanja daerah, dan jumlah penduduk. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Belanja daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal. Secara simultan, PDRB, belanja daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal perlu lebih diarahkan pada penguatan aktivitas ekonomi daerah yang mampu memperluas basis Pendapatan Asli Daerah, disertai dengan peningkatan kualitas dan produktivitas belanja daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas ekonomi dan perluasan basis penerimaan agar potensi demografi dapat memberikan kontribusi terhadap kapasitas fiskal daerah. Kebijakan peningkatan kemandirian fiskal juga perlu mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mengelola sumber daya, menetapkan prioritas pembangunan, serta

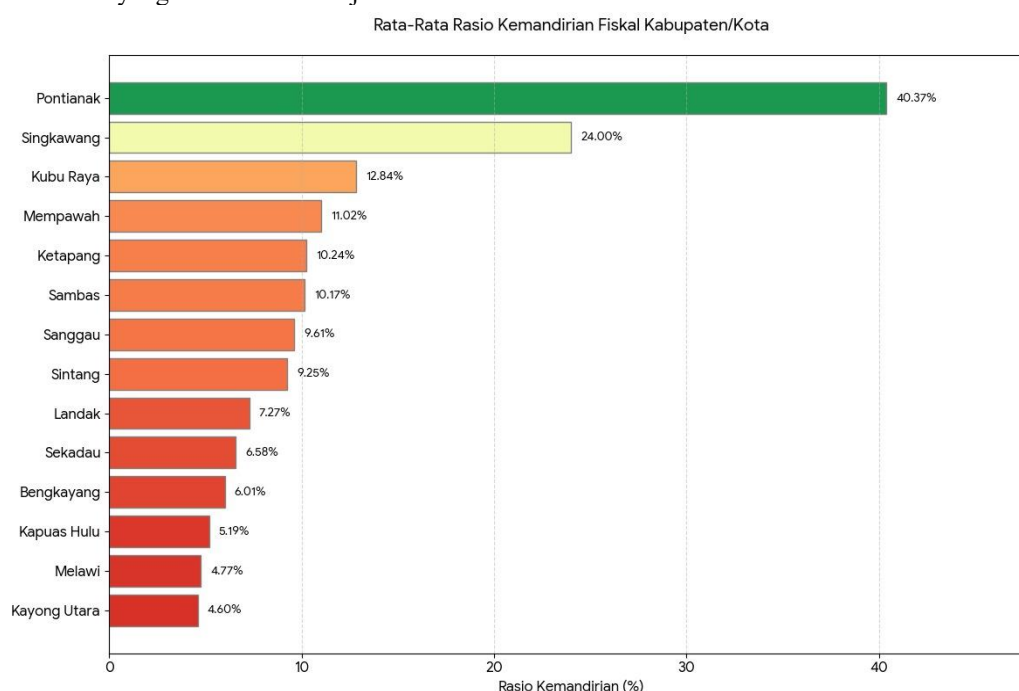
menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat [1]. Desentralisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan administratif, tetapi juga dengan penyerahan tanggung jawab fiskal. Daerah dituntut

memiliki kapasitas untuk menggali sumber pendapatan, mengelola anggaran secara efektif, dan membiayai sebagian besar kebutuhan pemerintahannya dengan sumber daya yang berasal dari wilayahnya sendiri. Dalam konteks ini, kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui pendapatan asli daerah (PAD), dengan tingkat ketergantungan yang semakin kecil terhadap transfer dari pemerintah pusat [2]. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dapat digunakan untuk melihat derajat kemampuan tersebut. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sumber pendapatan internal telah memiliki peran lebih kuat dalam struktur fiskal daerah, sedangkan rasio yang rendah menunjukkan bahwa

pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada Dana Transfer ke Daerah, termasuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus [3].

Kondisi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal antardaerah belum merata. Berdasarkan data awal yang dihimpun dalam proposal, 12 dari 14 kabupaten/kota berada pada kategori kemandirian fiskal sangat rendah. Kota Pontianak menjadi satu-satunya daerah yang mencapai kategori sedang, sedangkan Kota Singkawang masih berada pada kategori rendah. Kabupaten Kayong Utara, Kapuas Hulu, dan Melawi termasuk daerah dengan tingkat kemandirian fiskal paling rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan kemampuan daerah dalam mengonversi potensi ekonomi menjadi PAD dan membiayai agenda pembangunan secara mandiri [4].



Gambar 1. Perbandingan rata-rata tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat [4]

Perbedaan kemandirian fiskal tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik ekonomi dan fiskal yang beragam. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara teoritis memperluas aktivitas produksi, pendapatan masyarakat, dan objek pajak daerah. Akan tetapi, struktur perekonomian Kalimantan Barat masih banyak ditopang oleh sektor primer dan komoditas, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, serta penggalian [5]. Sebagian penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar tersebut menjadi penerimaan pemerintah pusat atau disalurkan kepada daerah melalui mekanisme bagi hasil. Akibatnya, peningkatan PDRB tidak selalu langsung memperbesar PAD kabupaten/kota.

Jumlah penduduk juga memiliki dua kemungkinan pengaruh. Populasi yang lebih besar dapat memperluas pasar lokal, meningkatkan konsumsi, memperbesar jumlah wajib pajak, dan mendorong penerimaan dari pajak hotel, restoran, hiburan, properti, serta retribusi. Namun, pada daerah yang luas dan memiliki sebaran penduduk rendah, penambahan penduduk dapat meningkatkan biaya penyediaan jalan, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dalam kondisi demikian, pertumbuhan kebutuhan belanja dapat lebih cepat daripada pertumbuhan PAD sehingga penduduk berpotensi menjadi tekanan fiskal [6].

Belanja daerah merupakan instrumen yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi apabila diarahkan pada pengeluaran produktif, khususnya infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, dan fasilitas ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik dapat menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas usaha, dan memperluas basis penerimaan daerah. Sebaliknya, dominasi belanja operasi dan belanja pegawai dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja modal. Struktur pengeluaran yang kurang produktif berpotensi menciptakan keterjebakan fiskal karena peningkatan anggaran tidak diikuti dengan perluasan sumber PAD [7].

Hasil penelitian terdahulu mengenai determinan kemandirian fiskal belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif PDRB, belanja daerah, jumlah penduduk, dan investasi terhadap kemandirian fiskal, sedangkan penelitian lain memperoleh pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan negatif [7]. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh variasi struktur ekonomi, kualitas belanja, basis perpajakan, karakteristik demografi, serta ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Oleh karena itu, pengujian pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat diperlukan untuk menghasilkan bukti empiris yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah.

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja daerah dan jumlah penduduk terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kontribusi penelitian terletak pada penggunaan data panel seluruh 14 kabupaten/kota selama sepuluh tahun serta pengujian simultan faktor ekonomi, fiskal, demografi, dan investasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan PAD, perbaikan kualitas belanja, pengelolaan pertumbuhan penduduk, dan penguatan dampak fiskal investasi.

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa penyediaan barang publik lokal akan lebih efisien apabila keputusan alokasi dilakukan oleh pemerintah yang dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi, kondisi geografis, dan kebutuhan penduduk sehingga dapat menyesuaikan kebijakan fiskal dengan karakteristik wilayah. Namun, desentralisasi belanja perlu diikuti oleh kemampuan pendapatan daerah. Ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer pusat dapat menurunkan insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan basis PAD dan berpotensi menimbulkan ilusi fiskal [8].

Dalam penelitian ini, kemandirian fiskal diukur melalui perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah. Ukuran tersebut menempatkan PAD sebagai sumber pembiayaan internal dan total pendapatan sebagai keseluruhan kapasitas penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio, semakin besar kontribusi pendapatan yang dihimpun pemerintah daerah sendiri dalam membiayai kebutuhan fiskalnya.

Teori pertumbuhan endogen menempatkan kebijakan fiskal dan kualitas pengeluaran pemerintah sebagai faktor yang dapat memengaruhi kapasitas produksi jangka panjang. Peningkatan PDRB menunjukkan berkembangnya produksi barang dan jasa, pendapatan, serta transaksi ekonomi. Perluasan aktivitas tersebut secara potensial meningkatkan objek pajak dan retribusi daerah. Daerah dengan basis ekonomi lebih besar juga memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan administrasi perpajakan dan sumber penerimaan baru [9].

Hubungan tersebut tidak selalu bersifat otomatis. Apabila pertumbuhan terutama berasal dari sektor yang kewenangan perpajakannya berada pada pemerintah pusat atau sektor informal yang sulit dijangkau, peningkatan PDRB dapat berlangsung tanpa peningkatan PAD yang sebanding. Meskipun demikian, secara teoritis pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan terhubung dengan basis pajak daerah diperkirakan memperkuat kemandirian fiskal [7].

Hukum Wagner menyatakan bahwa perkembangan ekonomi diikuti oleh peningkatan kebutuhan dan aktivitas pemerintah. Dalam perspektif Keynesian, belanja daerah dapat menjadi instrumen untuk mendorong permintaan agregat dan membentuk modal publik. Belanja yang diarahkan pada jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan pusat ekonomi dapat meningkatkan produktivitas sektor swasta, menurunkan biaya transaksi, serta memperluas kegiatan usaha [10].

Dampak belanja terhadap kemandirian fiskal sangat dipengaruhi oleh komposisi dan efektivitasnya. Belanja modal memiliki potensi *multiplier effect* yang lebih kuat, sedangkan dominasi belanja rutin dapat menekan ruang fiskal dan tidak segera menciptakan sumber PAD. Dengan asumsi pengeluaran dilaksanakan secara produktif dan tepat sasaran, peningkatan belanja daerah diperkirakan memperkuat kapasitas penerimaan daerah [11].

2. Metode Penelitian

2.1. Desain, Lokasi, dan Data Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan kausal antara variabel ekonomi, fiskal, demografi, investasi, dan kemandirian fiskal. Unit analisis terdiri atas 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Periode observasi direncanakan selama tahun 2015–2024 sehingga terbentuk panel seimbang sebanyak 140 observasi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data PDRB, jumlah penduduk, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik. Data PAD, total pendapatan daerah, dan belanja daerah diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data

dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran publikasi resmi untuk setiap kabupaten/kota dan tahun pengamatan.

2.2. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel yang digunakan dengan definisi operasional sebagai berikut.

- Variabel pertama adalah kemandirian fiskal (RKF), yang didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan dan pelayanan publik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) [1]. Variabel ini diukur dengan membagi PAD terhadap total pendapatan daerah yang kemudian dikalikan 100%, sehingga dinyatakan dalam satuan persen.
- Pertumbuhan ekonomi (PDRB), yang merupakan perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang diprosikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 [3]. Indikator pengukuran variabel ini menggunakan nilai PDRB ADHK 2010 dan memiliki satuan berupa Rupiah atau persen.
- Belanja daerah (BD), didefinisikan sebagai total realisasi pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran [3]. Variabel ini diukur secara langsung melalui total realisasi belanja daerah itu sendiri, dengan satuan pengukuran berupa Rupiah.
- Jumlah penduduk (JP) merujuk pada jumlah seluruh penduduk yang berdomisili pada suatu kabupaten/kota pada akhir tahun. Indikator dari variabel ini dilihat dari jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut dan dinyatakan dalam satuan jiwa [7].

2.3. Model Analisis Data Panel

Pengaruh variabel independen terhadap kemandirian fiskal diestimasi menggunakan regresi data panel. Model empiris dirumuskan dalam Persamaan (1). RKF adalah rasio kemandirian fiskal; PDRB adalah proksi pertumbuhan ekonomi; BD adalah belanja daerah; JP adalah jumlah penduduk; i menunjukkan kabupaten/kota; t menunjukkan tahun; α adalah konstanta; β_1 – β_4 adalah koefisien regresi; dan ε adalah komponen galat.

$$RKF_{it} = \alpha + \beta_1 \ln(PDRB_{it}) + \beta_2 \ln(BD_{it}) + \beta_3 \ln(JP_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Transformasi logaritma digunakan pada variabel berskala besar sesuai dengan rancangan awal penelitian. Bentuk transformasi akhir harus disesuaikan dengan karakteristik distribusi data dan konsistensi definisi operasional.

2.4. Pemilihan Model dan Pengujian Hipotesis

Estimasi diawali dengan membandingkan *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect*

model. Uji Chow digunakan untuk memilih antara *common effect* dan *fixed effect*. Uji Hausman digunakan untuk memilih antara *fixed effect* dan *random effect*. Apabila diperlukan, uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih antara *common effect* dan *random effect*. Model dipilih pada tingkat signifikansi 5%.

Pengujian diagnostik dilakukan sesuai dengan model terpilih, meliputi pemeriksaan multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan distribusi residual. Apabila ditemukan pelanggaran asumsi, estimasi perlu menggunakan koreksi yang sesuai, misalnya *standard error* yang *robust* atau pengelompokan *standard error* pada unit kabupaten/kota. Pengaruh parsial setiap variabel diuji dengan uji t , sedangkan pengaruh simultan diuji dengan uji F atau Wald sesuai model terpilih. Koefisien determinasi digunakan untuk menilai proporsi variasi kemandirian fiskal yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak ekonometrika EViews.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian menggunakan data panel yang menggabungkan dimensi *cross-section* dan *time series*. Data mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama 10 tahun, yaitu 2015 sampai dengan 2024. Dengan demikian, jumlah observasi yang digunakan sebanyak 140 observasi dan seluruh data membentuk *balanced panel* karena setiap kabupaten/kota memiliki jumlah periode pengamatan yang sama. Dalam interpretasi ini, variabel Y dipahami sebagai kemandirian fiskal, X_1 sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), X_2 sebagai belanja daerah, dan X_3 sebagai jumlah penduduk, sesuai dengan spesifikasi penelitian yang digunakan sebelumnya.

3.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variasi kemandirian fiskal, PDRB, belanja daerah, jumlah penduduk, dan PMDN antarkabupaten/kota selama periode penelitian. Uraian perlu menekankan nilai rata-rata, penyebaran, nilai minimum dan maksimum, serta daerah atau tahun yang menunjukkan karakteristik ekstrem. Hasil uji Statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0,115571	9835,712	1,36E+12	374247,5
Median	0,085000	6999,890	1,31E+12	337168,0
Maximum	0,470000	28784,470	2,45E+12	680852,0
Minimum	0,020000	2062,070	5,43E+11	105477,0
Std. Dev.	0,097871	6498,733	4,49E+11	167507,3
Skewness	2,174218	0,970423	0,261438	0,291317
Kurtosis	7,059627	2,988897	2,107122	1,783226
Jarque-Bera	206,438600	21,97422	6,245340	10,61667
Probability	0,000000	0,000017	0,044039	0,004950
Sum	16,180000	1377000,	1,90E+14	52394644
Observations	140	140	140	140

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 1, variabel kemandirian fiskal (Y) memiliki nilai rata-rata

sebesar 0,115571. Apabila Y dinyatakan dalam bentuk rasio, nilai tersebut setara dengan sekitar 11,56 persen. Nilai minimum sebesar 0,02 dan maksimum sebesar 0,47 menunjukkan adanya perbedaan kemampuan kemandirian fiskal yang cukup lebar antarkabupaten/kota dan antarperiode. Median sebesar 0,085 berada di bawah rata-rata, sedangkan *skewness* sebesar 2,174218 menunjukkan distribusi Y menceng ke kanan karena terdapat sejumlah pengamatan dengan tingkat kemandirian fiskal relatif tinggi dibandingkan mayoritas pengamatan.

PDRB (X1) memiliki rata-rata 9.835,712 dengan nilai minimum 2.062,070 dan maksimum 28.784,47, sesuai satuan data yang digunakan dalam penelitian. Standar deviasi sebesar 6.498,733 menunjukkan variasi PDRB yang cukup besar di antara kabupaten/kota. Belanja daerah (X2) rata-rata sebesar $1,36 \times 10^{12}$, dengan minimum sekitar $5,43 \times 10^{11}$ dan maksimum $2,45 \times 10^{12}$. Jumlah penduduk (X3) memiliki rata-rata 374.247,5 jiwa, dengan rentang 105.477 sampai 680.852 jiwa. Perbedaan rentang masing-masing variabel mengindikasikan heterogenitas karakteristik ekonomi, fiskal, dan demografi antarwilayah.

Nilai probabilitas Jarque-Bera pada statistik deskriptif seluruh variabel berada di bawah 0,05 ($Y = 0,000000$; $X1 = 0,000017$; $X2 = 0,044039$; $X3 = 0,004950$). Secara deskriptif hal ini menunjukkan distribusi masing-masing variabel tidak normal. Namun, dalam regresi, pengujian normalitas yang lebih relevan adalah normalitas residual model, bukan semata-mata normalitas setiap variabel secara individual.

3.2. Estimasi Dan Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow digunakan dalam regresi data panel untuk menentukan model yang lebih tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) [12]. Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini pada dasarnya menilai apakah efek individual berkorelasi dengan variabel independen [13]. Hasil Uji Chow dan Hausman dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Model Awal

Pengujian	Probabilitas	Keputusan	Model
Uji Chow	0,0000	$p < 0,05$: tolak H_0	FEM
Uji Hausman	0,0489	$p < 0,05$: tolak H_0	FEM

Uji Chow menghasilkan probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 yang menyatakan *Common Effect Model* lebih tepat ditolak, sehingga *Fixed Effect Model* lebih sesuai dibandingkan *Common Effect Model*. Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan probabilitas sebesar 0,0489, lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 yang mendukung *Random Effect Model* ditolak dan *Fixed Effect Model* dipilih. Dengan hasil tersebut, model data panel yang paling tepat untuk penelitian periode 2015–2024 adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.3. Persamaan Regresi *Random Effect Model*

Random Effect Model (REM) merupakan model regresi data panel yang memperlakukan perbedaan karakteristik antarindividu atau antarunit sebagai komponen acak (*random component*). Model ini tepat digunakan apabila efek individual tidak berkorelasi dengan variabel independen. Estimasi REM umumnya menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS), sehingga dapat mengakomodasi struktur komponen galat dalam data panel secara lebih efisien dibandingkan OLS apabila asumsi model terpenuhi [14]. Hasil uji Persamaan Regresi *Random Effect Model* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Persamaan Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,020019	0,037655	-0,531637	0,5959
X1	1,07E-05	3,75E-06	2,853200	0,0051
X2	-7,96E-15	2,44E-14	-0,326785	0,7444
X3	1,10E-07	1,58E-07	0,694923	0,4884

Berdasarkan FEM yang terpilih, persamaan umum regresi dapat dituliskan sebagai Persamaan (2).

$$Y = -0,020019 + 1,07E - 05 X1 - 7,96E - 15 X2 + 1,10E - 07 X3 + \varepsilon \quad (2)$$

Konstanta sebesar -0,020019 menunjukkan nilai dasar Y ketika $X1$, $X2$, dan $X3$ diasumsikan bernilai nol, setelah memperhitungkan struktur *fixed effect*. Namun, probabilitas konstanta sebesar 0,5959 menunjukkan konstanta tidak signifikan secara statistik. Dalam model *fixed effect*, interpretasi konstanta juga perlu dilakukan secara hati-hati karena setiap kabupaten/kota memiliki *intercept* khusus melalui efek tetap *cross-section*.

Koefisien PDRB ($X1$) sebesar 1,07E-05 memiliki tanda positif. Artinya, dengan asumsi variabel lain tetap dan efek tetap kabupaten/kota telah dikontrol, kenaikan PDRB sebesar satu satuan sesuai satuan pengukuran data berhubungan dengan kenaikan kemandirian fiskal sebesar 0,0000107 satuan. Karena probabilitasnya 0,0051, hubungan tersebut signifikan secara statistik pada taraf 5 persen.

Koefisien belanja daerah ($X2$) sebesar -7,96E-15 menunjukkan arah hubungan negatif. Secara mekanis, jika $X2$ dicatat dalam rupiah, kenaikan belanja daerah sebesar Rp1 triliun berkaitan dengan perubahan Y sekitar -0,00796 satuan, dengan variabel lain tetap. Akan tetapi, probabilitas sebesar 0,7444 jauh di atas 0,05 sehingga hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, penelitian tidak memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa perubahan belanja daerah secara parsial memengaruhi kemandirian fiskal selama periode pengamatan.

Koefisien jumlah penduduk ($X3$) sebesar 1,10E-07 menunjukkan arah hubungan positif. Secara mekanis, kenaikan 100.000 penduduk berkaitan dengan perubahan Y sekitar 0,011 satuan apabila variabel lain tetap. Namun, probabilitas 0,4884 lebih besar dari 0,05,

sehingga pengaruh jumlah penduduk tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, arah koefisien positif tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengaruh nyata jumlah penduduk terhadap kemandirian fiskal.

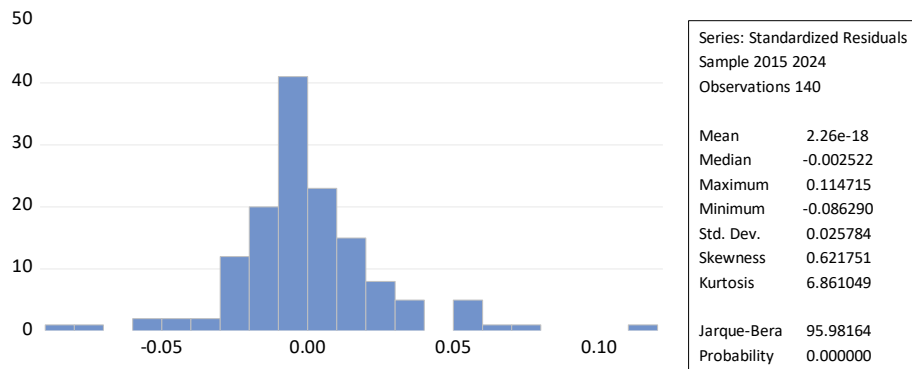
3.4. Evaluasi Uji Asumsi Dan Diagnostik

3.4.1. Uji Normalitas

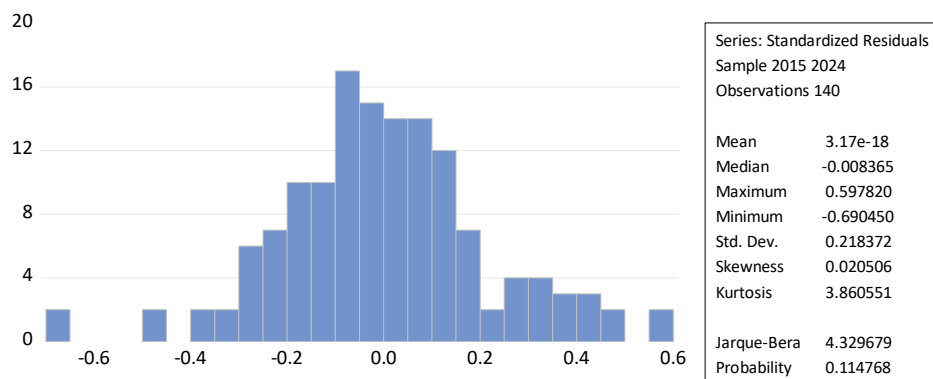
Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah residual model regresi mengikuti distribusi normal. Dalam EViews, normalitas residual dapat diuji menggunakan statistik Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas Jarque-

Bera $> 0,05$, residual dinyatakan tidak memiliki bukti yang cukup untuk menolak asumsi distribusi normal. Sebaliknya, nilai probabilitas $< 0,05$ menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 5% [15].

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 2. Nilai *probability* adalah $0,0000 < 0,05$ maka data menunjukkan belum berdistribusi normal, maka sebagai penyembuhan dilakukan dengan metode transformasi diferensiasi, dan dapat dilihat pada Gambar 3. Nilai *probability* adalah $0,114768 > 0,05$ maka data sudah berdistribusi normal.



Gambar 2. Uji Normalitas



Gambar 3. Uji Normalitas dengan Metode Transformasi Diferensiasi

3.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang sangat kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan *standar error* menjadi besar sehingga menyulitkan pengujian pengaruh masing-masing variabel. Pengujian dapat dilakukan menggunakan matriks korelasi atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF yang sangat tinggi, dan secara praktis sering menggunakan batas $VIF > 10$, mengindikasikan masalah multikolinearitas yang serius, [15]. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Pasangan Variabel	Korelasi Awal	Interpretasi
X1 – X2	0,698914	$< 0,80$; tidak menunjukkan masalah kuat
X1 – X3	0,933424	$> 0,80$; menunjukkan multikolinearitas tinggi
X2 – X3	0,756966	$< 0,80$; tidak menunjukkan masalah kuat

Korelasi X1 dengan X3 sebesar 0,933424 melebihi batas praktis 0,80 yang digunakan dalam dokumen, sehingga terdapat indikasi multikolinearitas kuat antara PDRB dan jumlah penduduk. Setelah X3 ditransformasikan menjadi D(X3), korelasi X1 dengan D(X3) turun menjadi 0,231322 dan korelasi X2 dengan D(X3) menjadi 0,162463. Seluruh korelasi hasil transformasi berada di bawah 0,80 sehingga berdasarkan kriteria tersebut masalah multikolinearitas dinyatakan berkurang atau teratasi.

3.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan pada seluruh observasi. Kondisi varians residual yang tidak konstan disebut heteroskedastisitas dan dapat menyebabkan *standar error* estimasi menjadi tidak akurat. Pengujian dapat dilakukan, antara lain, dengan uji Breusch-Pagan atau White. Apabila nilai probabilitas pengujian $> 0,05$, maka tidak terdapat bukti heteroskedastisitas pada tingkat signifikansi 5% [15]. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,016704	0,038526	0,433572	0,6654
X1	5,10E-06	3,84E-06	1,330014	0,1860
X2	-4,61E-14	2,49E-14	-1,848265	0,0670
X3	1,09E-07	1,62E-07	0,670866	0,5036

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan RESABS sebagai variabel dependen menghasilkan probabilitas X1 sebesar 0,1860, X2 sebesar 0,0670, dan X3 sebesar 0,5036. Seluruhnya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian yang digunakan dalam dokumen, tidak terdapat bukti heteroskedastisitas pada taraf signifikansi 5 persen.

3.4.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah residual suatu observasi berkorelasi dengan residual pada observasi lain, khususnya antarperiode waktu. Autokorelasi dapat menyebabkan *standar error* dan pengujian statistik menjadi tidak efisien. Dalam regresi konvensional, salah satu indikator yang sering digunakan adalah statistik Durbin-Watson, sedangkan dalam data panel pengujian *serial correlation* yang dirancang khusus untuk struktur panel lebih disarankan [14]. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Autokorelasi, Uji F dan Uji R-Square

Root MSE	0,025692	R-squared	0,930594
Mean dependent var	0,115571	Adjusted R-squared	0,921565
S.D. dependent var	0,097871	S.E. of regression	0,027410
Akaike info criterion	-4,242411	Sum squared resid	0,092412
Schwarz criterion	-3,885212	Log likelihood	313,9688
Hannan-Quinn criter.	-4,097256	F-statistic	103,0730
Durbin-Watson stat	0,966578	Prob(F-statistic)	0,000000

Nilai Dw adalah 1.438841. Nilai DL adalah 1.6791. Nilai DU adalah 1.7672. Nilai DW lebih kecil dari nilai DUA, maka data belum lolos dari masalah autokorelasi. Oleh karena itu, sebagai perbaikan, data bisa di uji dengan metode diferensiasi dan dapat dilihat hasilnya pada Tabel 7.

Nilai Durbin-Watson yang tercantum pada *output* FEM adalah 0,966578. Angka ini berbeda dengan narasi pada dokumen yang menyebut 1,438841. Dengan $dL = 1,6791$ dan $dU = 1,7672$, nilai DW awal 0,966578 berada di bawah dL , sehingga menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif. Setelah dilakukan

transformasi diferensiasi, nilai Durbin-Watson menjadi 1,787029. Karena $1,7672 < 1,787029 < 4 - 1,7672$ (2,2328), hasil setelah transformasi berada pada daerah tidak ada autokorelasi menurut kriteria Durbin-Watson yang digunakan.

Tabel 7. Uji Autokorelasi DW

Root MSE	0,197171	R-squared	0,904399
Mean dependent var	-2,359408	Adjusted R-squared	0,890365
S.D. dependent var	0,640237	S.E. of regression	0,211990
Akaike info criterion	-0,139651	Sum squared resid	4,898418
Schwarz criterion	0,243022	Log likelihood	25,79803
Hannan-Quinn criter.	0,015817	F-statistic	64,44700
Durbin-Watson stat	1,787029	Prob(F-statistic)	0,000000

3.5. Uji Hipotesis

3.5.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan variabel lainnya dianggap konstan. Apabila nilai probabilitas koefisien $< 0,05$, maka H_0 ditolak sehingga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila probabilitas $> 0,05$, pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% [15]. Hasil uji parsial atau uji t dapat dilihat pada Tabel 3.

Variabel X1 menunjukkan nilai sig adalah $0,0051 < 0,05$ maka X1 berpengaruh signifikan terhadap dependen Y. Variabel X2 menunjukkan nilai sig adalah $0,7444 > 0,05$ maka X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen Y. Variabel X3 menunjukkan nilai sig adalah $0,4884 > 0,05$ maka X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

3.5.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas *F-statistic* $< 0,05$, maka H_0 ditolak sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas $> 0,05$, maka pengaruh secara simultan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%, [15]. Hasil uji simultan atau uji F dapat dilihat pada Tabel 6.

F-statistic FEM sebesar 103,0730 dengan *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Dengan kata lain, model secara keseluruhan memiliki kemampuan statistik untuk menjelaskan variasi kemandirian fiskal kabupaten/kota selama periode 2015–2024.

3.5.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen relatif terbatas. Untuk model dengan beberapa variabel independen, Adjusted R^2 juga dapat digunakan karena telah memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel [15]. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Nilai *R-squared* FEM sebesar 0,930594 menunjukkan bahwa sekitar 93,06 persen variasi kemandirian fiskal dalam sampel dapat dijelaskan oleh PDRB, belanja daerah, jumlah penduduk, serta efek tetap yang menangkap perbedaan karakteristik antarkabupaten/kota. Sisanya sekitar 6,94 persen berkaitan dengan faktor lain di luar spesifikasi model dan komponen *error*. Adjusted *R-squared* sebesar 0,921565 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah parameter dalam model, kemampuan penjelasan model tetap tinggi, yaitu sekitar 92,16 persen.

Perlu diperhatikan bahwa pada *Fixed Effect Model*, *R-squared* yang tinggi tidak semata-mata mencerminkan kontribusi tiga variabel independen. Nilai tersebut juga mencakup kemampuan *dummy*/efek tetap *cross-section* dalam menangkap perbedaan karakteristik yang tidak berubah atau relatif tetap pada masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, pernyataan bahwa “X1, X2, dan X3 menjelaskan 93 persen Y” sebaiknya ditulis lebih hati-hati sebagai “model yang mencakup X1, X2, X3, dan efek tetap kabupaten/kota menjelaskan sekitar 93,06 persen variasi Y”.

3.6. Pembahasan

3.6.1. Pengaruh PDRB terhadap Kemandirian Fiskal

Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa PDRB (X1) memiliki koefisien sebesar 1,07E-05 dengan *t-statistic* 2,853200 dan probabilitas 0,0051. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan asumsi variabel lain konstan dan setelah mengendalikan efek tetap masing-masing kabupaten/kota, kenaikan satu unit PDRB berkaitan dengan kenaikan kemandirian fiskal sebesar 0,0000107 unit. Karena satuan X1 tidak dicantumkan dalam output yang tersedia, interpretasi besaran ekonominya sebaiknya tetap dinyatakan dalam satuan asli variabel.

Arah positif tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme perluasan basis ekonomi daerah. PDRB

yang meningkat mencerminkan bertambahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Ketika aktivitas produksi, perdagangan, jasa, konsumsi, investasi, dan transaksi ekonomi meningkat, potensi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber PAD lainnya juga berpeluang meningkat. Apabila potensi ekonomi tersebut dapat dikonversi secara efektif menjadi PAD, daerah akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan FEM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian fiskal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan faktor-faktor produksi secara optimal dapat meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi, yang selanjutnya memperkuat kemandirian fiskal [16]. Temuan ini juga memperoleh dukungan dari penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada sebagian kelompok wilayah di Indonesia [7].

Meski demikian, hubungan PDRB dan kemandirian fiskal tidak selalu seragam. Penelitian tertentu menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta [9]. Penelitian berbeda juga menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi berbeda antarregional [7]. Mereka menekankan bahwa struktur sektor ekonomi dapat menentukan seberapa besar pertumbuhan ekonomi benar-benar terkonversi menjadi PAD. Pada wilayah yang aktivitas ekonominya ditopang sektor yang penerimaannya lebih banyak dipungut atau dibagi melalui mekanisme pemerintah pusat, peningkatan PDRB tidak selalu langsung meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, hasil positif dan signifikan pada Kalimantan Barat tidak hanya menunjukkan pentingnya memperbesar ukuran perekonomian daerah, tetapi juga menekankan pentingnya kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam menangkap manfaat fiskal dari pertumbuhan tersebut. Kebijakan peningkatan PDRB akan lebih efektif bagi kemandirian fiskal apabila disertai perluasan basis pajak daerah, pemutakhiran basis data wajib pajak, digitalisasi pemungutan, penguatan kepatuhan, pengembangan sektor formal, dan pengelolaan aset daerah secara produktif. Arah ini sejalan dengan semangat UU Nomor 1 Tahun 2022 yang memperkuat pengaturan sumber penerimaan daerah, [17].

3.6.2. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian Fiskal

Belanja daerah (X2) memiliki koefisien sebesar -7,96E-15 dengan *t-statistic* -0,326785 dan probabilitas 0,7444. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05, belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Tanda koefisien yang negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan, tetapi karena pengaruhnya tidak signifikan, tanda tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kenaikan belanja daerah secara pasti menurunkan kemandirian fiskal.

Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah secara nominal belum tentu menjadi penentu langsung kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal lebih berkaitan dengan kemampuan daerah menyediakan sumber pembiayaan yang berasal dari kapasitas fiskalnya sendiri. Daerah dapat memiliki belanja yang besar, tetapi apabila sebagian besar belanja tersebut ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat, peningkatan belanja belum tentu menunjukkan penguatan kemandirian. Sebaliknya, belanja yang diarahkan pada kegiatan produktif, peningkatan kualitas pelayanan, infrastruktur ekonomi, dan penguatan basis penerimaan dapat menghasilkan dampak fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Perlu dicatat bahwa variabel X2 dalam penelitian ini adalah belanja daerah secara total, sehingga hasilnya tidak dapat disamakan secara langsung dengan penelitian yang menggunakan belanja modal atau belanja pegawai. Namun, studi terdahulu mengenai komponen belanja memberi konteks penting. Penelitian sebelumnya menemukan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Jawa Tengah dan menjelaskan bahwa rendahnya porsi belanja modal serta penggunaan yang belum cukup produktif dapat membatasi pengaruhnya terhadap kemandirian [16]. Sebaliknya, penelitian berbeda menemukan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan di Daerah Istimewa Yogyakarta [9]. Penelitian tertentu juga menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja pegawai memberikan pengaruh yang berbeda menurut wilayah, sehingga struktur dan kualitas belanja menjadi lebih penting daripada sekadar besaran total [7].

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya meningkatkan kemandirian fiskal tidak cukup dilakukan melalui ekspansi anggaran belanja. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pertumbuhan belanja diikuti dengan peningkatan kualitas belanja, efisiensi, ketepatan sasaran, dan efek pengganda terhadap aktivitas ekonomi serta PAD. UU Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan pengelolaan belanja daerah sebagai salah satu ruang utama hubungan keuangan pusat dan daerah, sehingga peningkatan kualitas belanja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kapasitas fiskal daerah [17].

3.6.3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Fiskal

Jumlah penduduk (X3) mempunyai koefisien sebesar 1,10E-07 dengan *t-statistic* 0,694923 dan probabilitas 0,4884. Nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2015–2024. Koefisiennya bertanda positif, tetapi hubungan positif tersebut belum didukung bukti statistik yang cukup kuat pada tingkat signifikansi 5 persen.

Secara teoritis, jumlah penduduk dapat memperbesar pasar, tenaga kerja, konsumsi, serta basis potensial pembayar pajak dan retribusi. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak otomatis menjadi kapasitas fiskal. Dampak fiskalnya bergantung pada kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat formalitas aktivitas ekonomi, kepatuhan pajak, struktur konsumsi, kepemilikan aset yang menjadi objek pajak, dan kemampuan administrasi pemerintah daerah. Jika pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat daripada penciptaan pekerjaan produktif dan perluasan basis pajak, tambahan penduduk justru dapat meningkatkan kebutuhan pelayanan publik tanpa menghasilkan peningkatan PAD yang sebanding.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah [18]. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan permintaan, penawaran, dan aktivitas ekonomi sehingga berpotensi menambah pendapatan daerah. Penelitian berbeda juga menemukan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta [9].

Namun, tidak signifikkannya jumlah penduduk dalam penelitian ini tetap konsisten dengan gagasan bahwa pengaruh demografi bersifat kontekstual. Penelitian menemukan bahwa jumlah penduduk signifikan pada sebagian regional di Indonesia, tetapi tidak signifikan pada regional lainnya [7]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ukuran populasi perlu dilihat bersama kepadatan, struktur ekonomi, produktivitas, pendapatan masyarakat, serta kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, bagi kabupaten/kota di Kalimantan Barat, fokus kebijakan sebaiknya tidak hanya pada pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi pada peningkatan produktivitas dan kemampuan ekonomi penduduk agar dapat memperluas basis penerimaan daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024, model regresi data panel yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi daerah cenderung diikuti oleh peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Sementara itu, belanja daerah memiliki arah pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal, yang menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah belum secara langsung mampu meningkatkan kemandirian fiskal. Jumlah penduduk memiliki arah pengaruh positif namun tidak signifikan, sehingga peningkatan jumlah penduduk belum dapat menjadi faktor penentu langsung dalam meningkatkan kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Tingginya kemampuan penjelasan model juga menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik antarkabupaten/kota memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kemandirian fiskal. Oleh karena itu, upaya peningkatan kemandirian fiskal di Provinsi Kalimantan Barat perlu diarahkan pada penguatan aktivitas ekonomi daerah, peningkatan kualitas dan produktivitas belanja daerah, serta optimalisasi potensi ekonomi penduduk dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas fiskal masing-masing kabupaten/kota.

Daftar Pustaka

- [1] Alvaro, R. (2020). Analisis determinasi derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 130–152. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.59>
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- [3] Juwita, R., & Widia, A. (2022). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. *Land Journal*, 3(1), 69–76. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1750>
- [4] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2025). *Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2025*. Retrieved from <https://kalbar.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/92f4a45275e2718dfbc93890/provinsi-kalimantan-barat-dalam-angka-2025.html>
- [5] Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat menurut lapangan usaha 2020-2024*. Retrieved from <https://kalbar.bps.go.id/id/publication/2025/06/30/f7b8b9a9c9e45702c6775b53/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-provinsi-kalimantan-barat-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html>
- [6] Adnyana, I. G. S., Febrianti, C., & Amyar, F. (2022). Pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan surplus/defisit laporan keuangan pada ketahanan fiskal pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 141–152. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1266>
- [7] Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(4), 277–290. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.858>
- [8] Boadway, R., & Shah, A. (2009). *Fiscal federalism: Principles and practice of multiorder governance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511626883>
- [9] Rahmadani, F. (2022). Factors affecting regional financial independence in the Special Region of Yogyakarta. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 5(1), 1468–1478. <https://doi.org/10.15294/efficient.v5i1.50786>
- [10] Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- [11] Nicola, R. N., & Saleh, M. (2023). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), belanja modal dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 995–1007. <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11080>
- [12] Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605. <https://doi.org/10.2307/1910133>
- [13] Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271. <https://doi.org/10.2307/1913827>
- [14] Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>
- [15] Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- [16] Larasati, N. (2022). *Determinan Tingkat Kemandirian Fiskal Di Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [17] Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- [18] Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, belanja pegawai dan leverage terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>